

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM) DI DESA SALAM TANI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

Ridhon MB Simanginsong
Dosen Prodi Adm. Bisnis Fisipol UHN Medan
ridhon.mangubs@gmail.com

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses Implementasi dan mengetahui kinerja implementasi PNPM-MP pada program SPP di Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data Kepala Desa Salam Tani, Ketua TPK PNPM, Ketua kelompok SPP, Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu tergolong kedalam program yang cukup baik. Kinerja implementasi PNPM-MP pada Program SPP sudah baik hal ini dilihat dari hasil kegiatan dimana memberi manfaat positif bagi masyarakat (perempuan). Telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan ekonomi dan taraf hidup baik. Kedepannya Perlunya penerahan Sumber Daya yang lebih baik, Pelatihan dan bimbingan perlu lebih ditingkatkan, Perlu dibuat suatu sistem untuk memantau penggunaan dana oleh penerima SPP. Program ini harus mendapat perhatian yang lebih besar dari pihak yang terkait agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih baik lagi terutama di tingkat Desa.

Kata Kunci: Kebijakan PNPM-MP, Program SPP, Meningkatkan Ekonomi.

ABSTRACT : The purpose of this study was to determine the implementation process and determine the performance of PNPM-MP implementation on the SPP program in Salam Tani Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency. This study used descriptive qualitative method. Sources of data are Salam Tani Village Head, PNPM TPK Chair, SPP group chairman, Community members who are members of the Women's Savings and Loans Group. Women's Savings and Loans in Salam Tani Village, Pancur Batu District is classified as a fairly good program. The performance of PNPM-MP implementation in the SPP Program has been good, this can be seen from the results of activities which provide positive benefits for the community (women). Has been able to help local communities in improving the economy and a good standard of living. In the future, there is a need for better mobilization of resources, more training and guidance needs to be developed, a system is needed to monitor the use of funds by SPP recipients. This program must receive greater attention from related parties so that the activities carried out are even better, especially at the village level.

Keywords: PNPM-MP Policy, SPP Program, Improving the Economy

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. Program PNPM ini terdiri dari tiga program pokok yang sudah disusun oleh pemerintah pusat, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat ditingkat pedesaan dengan memandirikan anggotanya. Dalam Pembangunan yang menjadi salah satu permasalahan adalah

isu jender, dimana peranan perempuan agak dikesampingkan sehingga mereka tidak dapat menyalurkan potensi yang mereka miliki terutama untuk peningkatan taraf hidup mereka. Selama ini yang terjadi adalah kondisi sosial yang sangat menonjolkan peran laki-laki. Laki-laki dianggap kaum yang derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih besar baik dalam mengatur rumah tangga, memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan menjadi kaum marjinal yang selalu terpinggir dan tergesur. Emansipasi wanita yang selama ini terkondisi sedikit banyak membantu perempuan untuk tetap eksis, akan tetapi perempuan masih saja terikat kepada norma-norma patriarkhi yang sangat mengikat dan membuat wanita harus berusaha ekstra keras untuk mendapat posisi dan menjadikan tugas dan peranan yang banyak. Permasalahan gender sebenarnya bertumpu pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan peran dan beban antara laki-laki dengan perempuan sehingga menghambat proses pembangunan yang berakhir pada kemiskinan. Jadi salah satu cara untuk mencapai pembangunan yang baik dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memberdayakan perempuan dan adanya kesetaraan peranan dan beban antara laki-laki dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, Desa Salam Tani merupakan salah satu desa yang menjadi target dari PNPM Mandiri Pedesaan, yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Desa Salam Tani memiliki potensi alam yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyaknya rumah tangga Miskin (RTM) di desa Salam Tani. Di Desa Salam Tani telah dibentuk suatu program yang bernama Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang ada di desa tersebut dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Desa tersebut. Simpan Pinjam Perempuan ini dibentuk seiring hadirnya PNPM Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan sangat penting. Melalui PNPM Mandiri merumuskan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka berperan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : Bagaimanakah Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu dan untuk mengetahui kinerja Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Said Zinal Abidin (2004. 17) adalah terjemahan langsung dari kata *policy science*. Beberapa ahli seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Freidman dan lain-lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Leo Agustino (2012. 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas peneliti simpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Implementasi Kebijakan

Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti (2012. 20) berpendapat implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik administrasi. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji – janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). *Lebih lanjut* Erwan Agus Purwanto mendefinisikan implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada

kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Dari pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses penerapan kebijakan yang berasal dari alasan yang akan diterapkan pada sasaran (*target group*), dimana implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai untuk mencapai tatanan kehidupan masyarakat yang baik.

Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soerjono Soekanto, 2006. 320).

Pengertian PNPM Mandiri

Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (NO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007) Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), merumuskan pengertian PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

- a) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: informan kunci yaitu ketua pelaksana kegiatan PNPM Mandiri, Informan utama, yaitu ketua kelompok ibu penerima dana Simpan Pinjam Perempuan dan

informan tambahan adalah penerima dana Simpan Pinjam Perempuan serta informan Utama ibu rumah tangga penerima SPP yang jumlahnya tergantung dari jawaban yang diberikan.

Menurut Nalom Siagian (2021: 52), proses atau tahapan penelitian setelah data data yang diperlukan terhimpun dengan baik, maka di perlukan upaya untuk mengelola dan menganalisis dengan seksama agar didapatkan gambaran yang presisi mengenai realitas yang diteliti. Beberapa perlakuan yang wajib dilakukan oleh peneliti terhadap data yang telah didapatkan dari lapangan adalah *editing*, *coding*, dan *tabulasi*. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Analisis data dilakukan untuk memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Salam Tani masuk dalam wilayah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, berjarak $\pm 0,6$ Km dari Kantor Camat Pancur Batu yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 15 menit dan berjarak ± 40 Km dari pusat Kota Medan ditempuh dengan kendaraan bermotor selama selama 60 menit, kemudian jarak Desa ke Ibu kota Provinsi Sumatera Utara ± 30 Km. Desa Salam Tani memiliki luas wilayah ± 600 Ha, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Sebelah Selatan berbatas dengan Suka Dame, Kecamatan Pancur Batu, Sebelah Timur berbatas dengan Desa Hulu Pertampilen, Namoriam, Sebelah Barat berbatas dengan Desa Namorih. Jumlah penduduk Desa Salam Tani secara keseluruhan berjumlah 1.043 jiwa, jika dikelompokkan laki-laki berjumlah 528 jiwa dan perempuan berjumlah 515 jiwa, dan jumlah Kepala keluarga (KK) secara keseluruhan sebanyak 308 KK. Pada saat kebijakan diimplementasikan dilapangan tentu sosialisasi merupakan suatu tindakan yang rutin wajib dilakukan oleh tim pelaksana. Sosialisasi perlu dilakukan terkait pemberian informasi mengenai perubahan aturan yang terjadi dilapangan Pernyataan ini didukung dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan pada proses pelaksanaan pihak desa dan pihak lain-lainnya sering melakukan Sosialisasi terkait adanya informasi atau pemberitahuan penting terkait PNPM-MP khususnya pada Program SPP ini.

Selain itu pernyataan ini juga diperkuat oleh ketua TPK yang menyatakan Sosialisasi dilakukan secara rutin yang dilakukan setiap bulan dengan melakukan kunjungan disetiap kelompok penerima SPP. Serta juga melakukan koordinasi dengan semua ketua kelompok ibu penerima SPP di Desa Salam Tani. Pengamatan peneliti terkait sosialisasi yang dilakukan cukup baik karena sosialisasi rutin dilakukan setiap bulannya sehingga masyarakat dapat secara langsung menyampaikan keluhan-keluhannya terkait program yang sedang dilaksanakan sehingga masyarakat cukup memahami Program yang sedang dijalankan.

Penyebaran informasi program yang sedang dijalankan tentu sangat berguna. Suatu program yang sedang diimplementasikan kepada masyarakat seyogyanya masyarakat sudah memahami secara mendalam apa program yang sedang dijalankan dan apa tujuan serta tanggungjawabnya. Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan kegunaannya kita lakukan sosialisasi, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam apa itu Program dan bagaimana cara kerja dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh ibu-ibu penerima SPP. Hal senada diungkapkan oleh ketua TPK yang menyatakan gunanya yaitu untuk memudahkan pemberian pemahaman sehingga peserta SPP tidak lagi mengalami kebingungan dengan program yang diberikan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh ketua kelompok penerima dana SPP yang menyatakan untuk memudahkan para pelaksana dalam proses implementasi program, karena masyarakat sudah mengerti apa tujuan dari program ini.

Proses Partisipatif Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial

Dalam proses implementasi suatu kebijakan PNPM-MP khususnya program SPP tentu yang menjadi target mereka yang merupakan ibu-ibu rumah tangga dari RTM, hal ini tentu harus serius dilihat dalam proses pemetaan yang seharusnya dengan yang terjadi dilapangan. Tidak terkecuali dengan proses pemetaan rumah tangga miskin di Desa Salam Tani yang tergolong sudah baik dan maksimal.

Hal ini didukung dari pernyataan kepala Desa Salam Tani terkait pemetaan RTM yang menyatakan bahwa dari awal adanya Program ini kami akan mengambil masyarakat yang memperoleh pendapatan dibawah pendapatan rata-rata penduduk Desa Salam Tani. Kami mengambil mereka yang benar-benar membutuhkan dan mau bertanggungjawab secara utuh. Pernyataan peneliti juga diperkuat dari hasil dengan ketua TPK yang menyatakan bahwa Masyarakat yang menerima dana pinjaman SPP masyarakat yang di kategorikan RTM dari segi ekonomi dan memperoleh pendapatan dibawah pendapatan perkapita secara nasional.

Pemetaan Sosial akan cukup baik apabila program yang dilaksanakan tepat sasaran. Hal ini dapat diukur dari kesesuaian antara sasaran program yang seharusnya dengan yang terjadi dilapangan. Pernyataan ini didukung dari jawaban responden yang menyatakan bahwa program sudah tepat sasaran. Selain itu pernyataan ini juga diperkuat oleh kepala Desa Salam Tani yang menyatakan Penerimaannya adalah masyarakat yang tergolong rumah tangga yang sangat miskin (RTSM). Jadi saya rasa orang-orang penerima bantuan SPP sudah tepat sasaran, karena pemilihannya terlebih dahulu dilakukan survey.

Bertolak belakang dengan yang dinyatakan oleh ketua TPK yang menyatakan Penerimaannya adalah ibu rumah tangga dari keluarga RTM. Beliau juga mengungkapkan bahwa masalah penentuan peserta SPP masih belum pas, karena selang waktu ketika di survey dan waktu pencairan cukup lama. Jadi peserta bisa saja berubah sosial ekonominya. Misalnya saja masyarakat pindahan

kategori RTSM dan layak menerima bantuan tersebut tapi tidak menerima dana pinjaman, karena survey dilakukan sudah lama.

Pernyataan peneliti juga diperkuat dari hasil wawancara dengan ketua kelompok peserta SPP yang menyatakan bahwa jarak waktu antara pelaksanaan survey dengan pencairan dana SPP terlalu jauh, sehingga sasaran SPP menjadi tidak tepat. Padahal tepat tidaknya sasaran penerima SPP berpengaruh pada sudah terlaksana tidaknya Program ini dengan baik. Walaupun secara umum perubahan ekonomi seseorang relatif lambat, sehingga tidak tepatnya sasaran penerima SPP kemungkinan kecil terjadi dengan demikian implementasi kebijakan PNPM-MP pada Program SPP sudah tergolong terlaksana dengan baik.

Perencanaan Partisipatif Ditingkat Desa

Masalah tingkat partisipatif ditingkat Desa juga baik apabila pihak-pihak terkait dengan implementasi program melaksanakan tugasnya dengan baik dan ikut serta kelapangan memantau pelaksanaan program. Pihak yang terkait dengan PNPM-MP pada program SPP adalah; Kecamatan dan Desa yang memiliki agen pelaksana yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang serta ketepatan atau kesesuaian pelaksanaan PNPM-MP.

Secara umum struktur pelaksana PNPM-MP di Desa Salam Tani bersifat sederhana. Setelah program ini diturunkan dari Kecamatan Pancur Batu tim kordinasi daerah kepada Desa Salam Tani, lalu diberikan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan, maka tanggungjawab penuh pelaksanaan program ini adalah ditangan TPK yang mengkoordinir langsung masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara umum Struktur organisasi, pembagian tugas dan kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang telah diatur sudah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan utama yang menyatakan bahwa Ada pendamping SPP, pihak pedesaan. Kalau cara kerja mereka saya lihat sudah cukup bagus. Kecenderungan tingkah laku pihak yang terlibat dalam suatu program sangat menentukan keberhasilan program. Misalnya pelaksana turut ikut memantau kegiatan, hal ini didukung dari jawaban Ketua TPK yang menyatakan bahwa ia turun kelapangan untuk melihat kegiatan masyarakat dalam proses menjalankan usaha untuk melihat mereka bagaimana program ini dijalankan.

Hal senada juga dinyatakan ketua kelompok peserta SPP yang menyatakan bahwa sekali dua minggu beliau selalu rutin memantau anggota-anggota kelompok SPPnya. Seperti apa perubahan kondisi mereka sekarang dan juga mengamati penggunaan dana SPP tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan responden yang menyatakan bahwa pendamping selalu turun kelapangan. Terkait pelayanan yang diberikan oleh Tim pelaksana sudah cukup baik, walaupun ada sedikit keluhan yang dirasakan masyarakat, hal ini dinyatakan oleh responden yang menyatakan bahwa Sedikit-sedikit tentu ada, dimana beliau pernah membuat usaha pembuatan opak namun usaha tersebut terhambat karena

tidak adanya penyalur. Namun keluhan-keluhan yang dirasakan oleh peserta langsung ditindak lanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kelompok SPP yang menyatakan Terkait keluhan-keluhan yang disampaikan para peserta SPP selalu mendapat respon dan tanggapan dari Tim pelaksana kegiatan, sehingga peserta SPP merasa dipedulikan.

Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, dimana setiap keluhan-keluhan dari masyarakat selalu ditindaklanjuti oleh TPK. Pernyataan peneliti ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan ketua TPK yang menyatakan bahwa Ketika ada keluhan dari peserta SPP ataupun masyarakat non peserta SPP, kami selalu menindaklanjuti keluhan tersebut dengan berkoordinasi dengan pandamping untuk melakukan pengecekan terhadap pengaduan tersebut. Namun sejauh ini paling satu atau dua masyarakat yang mempunyai keluhan.

Kegiatan Anggota Kelompok SPP dalam Program SPP.

Pada proses Implementasi akan berhasil atau tidak dilihat dari tingkat keseriusan masyarakat dalam menjalankan program yang ditujukan kepadanya. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, bahwa masyarakat sudah cukup berkomitmen dalam mengelola dana pinjam yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini didukung dari pernyataan ketua kelompok penerima SPP yang menyatakan bahwa Kalau saya melihat para peserta SPP di Desa Salam Tani sudah menggunakan dana pinjaman SPP yang mereka terima sebagai modal usaha baru atau penambah modal usaha. Meski tak dapat dipungkiri dana bantuan tersebut untuk digunakan untuk modal usaha, tapi juga digunakan untuk hal lain misalnya membeli keperluan dapur. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, bahwa dana pinjaman yang berikan sudah dapat dikelola dengan baik oleh ibu-ibu penerima dana tersebut.

Pernyataan peneliti ini juga didukung dari hasil wawancara dengan kepala Desa salam tani yang menyatakan bahwa Peserta SPP sudah menggunakan dana pinjaman yang diberikan dengan baik. Sebagai contoh ada seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki usaha warung kecil sebelum mendapat dana pinjaman, setelah mendapat kucuran dana pinjaman ibu tersebut mampu mengembangkan warungnya menjadi lebih besar. Jadi saya rasa peserta SPP sebagian besar sudah dapat mempertanggungjawabkannya.

Kinerja Implementasi Kebijakan PNPM-MP Pada Program SPP

Hasil suatu kegiatan yang dilaksanakan akan maksimal apabila pelayanan yang diberikan oleh pihak yang turut terlibat langsung dalam suatu program. Terkait dalam program Simpan Pinjam Perempuan ini yang akan bertanggungjawab memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah Tim pelaksana kegiatan. Jaringan pelayanan yang diberikan oleh Tim pelaksana kepada sasaran program SPP. Pihak yang terkait dengan program SPP di Desa Salam Tani cenderung mempunyai

sikap yang baik dalam menyikapi keluhan masyarakat terkait program yang dilaksanakan.

Hal ini didukung dari jawaban ketua kelompok penerima SPP yang menyatakan bahwa menerima keluhan baik dari peserta maupun masyarakat yang bukan peserta, serta menanggapinya dengan baik sehingga masyarakat menjadi mengerti. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua TPK yang menyatakan bahwa selalu merespon keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan ketidakpahaman masyarakat dan menjelaskannya sehingga masyarakat menjadi mengerti.

Pernyataan ini juga diperkuat Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa keluhan dari anggota atau peserta SPP jarang terjadi. Keluhan justru lebih sering muncul dari masyarakat non anggota SPP mengenai penentuan rumah tangga yang layak menjadi peserta SPP. Mereka mengeluhkan bahwa penentuan pelayanan menjadi anggota SPP tidak adil. Tetapi setelah mendapat penjelasan dari Ketua TPK, mereka menjadi mengerti dan meklum.

Dalam ketentuannya, pelayanan yang diterima oleh kelompok peserta SPP dari pihak-pihak pelaksana program harus pelayanan yang sudah ditentukan, terkait hal ini didukung oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa mereka sudah memperoleh pelayanan yang baik dari pihak pelaksana program dan tidak pernah merasa di acuhkan. Juga dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, dimana pihak pelaksana program yang turut berpartisipasi langsung dalam kegiatan SPP di Desa Salam Tani selalu melakukan kewajiban dan tugas dengan penuh tanggungjawab. Mulai dari ikut dalam musyawarah sampai kepada pelaksanaan program dan pengawasan program.

Pernyataan peneliti juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Ketua TPK yang menyatakan bahwa masyarakat selalu menerima pelayanan yang terbaik dari pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai Tim pelaksana program SPP. Pelayanan ini terkait dengan hal-hal yang kurang dipahami masyarakat kemudian diberikan penjelasan secara detail terkait hal yang tidak dipahami tersebut, sehingga masyarakat mengerti dan paham.

Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua kelompok penerima dana SPP yang menyatakan bahwa pelayanan yang diterima oleh anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan sudah cukup maksimal, terkait dalam hal kelancaran usaha yang dibuat oleh anggota SPP. Mereka diberikan akses dalam hal penyaluran usaha yang dibuat peserta Simpan Pinjam Perempuan.

Secara umum jaringan pelayanan yang diberikan Tim pelaksana program kepada peserta kelompok Simpan Pinjam Perempuan sudah cukup maksimal. Hal ini didukung dari jawaban responden yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program ini turut turun kelapangan untuk mengawasi kegiatan yang mereka sedang melaksanakan dan memberi saran dan masukan terkait hal yang tidak dipahami oleh peserta Simpan Pinjam Perempuan. Hal senada juga diungkapkan oleh kepala Desa Salam Tani bahwa masyarakat selalu menerima pelayanan yang terbaik dari pihak-pihak yang bertanggungjawab

didalam kegiatan ini. Pelayanan terkait masyarakat menerima apa yang menjadi hak mereka sebagai anggota kelompok SPP tanpa ada unsur-unsur lain yang menjadi penghambat.

Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga

Secara umum tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan ialah peningkatan dari segi ekonomi terutama peningkatan ekonomi rumah tangga. Demikian pula terkait dengan kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat Desa Salam Tani terutama bagi rumah tangga miskin. Dalam pelaksanaan program SPP di Desa Salam Tani mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan responden yang menyatakan bahwa ekonomi masyarakat meningkat setelah adanya program Simpan Pinjam Perempuan. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, ekonomi masyarakat Desa Salam Tani semakin membaik seiring adanya program Simpan Pinjam Perempuan.

Pernyataan peneliti juga didukung dari jawaban Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa perekonomian masyarakat semakin meningkat seiring adanya program SPP. Hal ini dapat dilihat dari segi kehidupan peserta Simpan Pinjam Perempuan yang semakin meningkat dan juga mampu mengembangkan dirinya. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua TPK menyatakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh masyarakat setelah mendapat dana SPP, keluarga yang miskin menjadi terbantu seiring adanya program SPP ini hal ini dapat dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan, dimana ia mampu meningkatkan ekonomi rumah tangganya dilihat dari taraf kehidupan yang semakin meningkat pula.

Dari ekonomi peserta Simpan Pinjam Perempuan yang semakin meningkat tentu ada manfaat positif yang diperoleh masyarakat sebagai peserta kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Manfaat yang dimaksud ialah apa yang diperoleh masyarakat setelah masyarakat mampu meningkatkan ekonomi rumah tangganya seiring bergulirnya dana Simpan Pinjam Perempuan. Terkait manfaat yang diperoleh peserta SPP di Desa Salam Tani adalah positif. Hal ini didukung dari pernyataan Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa program Simpan Pinjam Perempuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi ibu-ibu dari RTM yang menjadi peserta Simpan Pinjam Perempuan dimana mereka dapat menambah pendapatan keluarga. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua kelompok peserta Simpan Pinjam Perempuan yang menyatakan bahwa ada manfaat yang diperoleh masyarakat dalam kegiatan ini, program ini membantu masyarakat dari segi pendapatan dimana masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Secara umum dapat dilihat bahwa seiring adanya program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani masyarakat dari RTM mampu meningkatkan ekonomi rumah tangganya dan memperoleh hidup yang lebih sejahtera. Hal ini diperkuat oleh pernyataan responden yang menyatakan bahwa dana Simpan

Pinjam Perempuan membantu dari segi peningkatan ekonomi rumah tangga dan seiring dengan kesejahteraan hidup yang diperoleh masyarakat.

Penguatan Kelembagaan Simpan Pinjam Perempuan

Dalam program Simpan Pinjam Perempuan penguatan kelembagaan juga menjadi salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan tersebut. Kelembagaan maksudnya yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tatacara dan perosudur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Terkait hal ini berkaitan dengan tanggungjawab peserta SPP terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani masyarakat yang menjadi peserta SPP sudah cukup menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya terkait program tersebut. Hal ini didukung dari jawaban responden yang menyatakan bahwa peserta SPP berhak untuk mendapatkan dana yang seharusnya dan berhak mendapat pelayanan yang maksimal. Namun tidak melupakan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan dana yang diberikan dengan menggunakan dana tersebut untuk modal usaha. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian terkait penguatan kelembagaan oleh peserta SPP sudah baik.

Pernyataan peneliti juga didukung dari jawaban Ketua TPK yang menyatakan bahwa peserta Simpan Pinjam Perempuan menggunakan dana seperti yang sudah ditentukan yaitu sebagai modal usaha dan juga masyarakat sangat serius menjalankan usahanya. Hal senada juga dinyatakan oleh Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa semua peserta Simpan Pinjam Perempuan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, sehingga dalam kelompok pelaksanaan program SPP mereka saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian maka secara otomatis kelompok SPP mereka akan tetap kokoh dan semakin kuat.

Kelembagaan suatu kelompok Simpan Pinjam Perempuan akan tetap utuh apabila anggota kelompok selalu menunjukkan sikap yang membangun bagi penguatan kelompok. Penguatan kelompok akan terjaga apabila setiap individu dari anggota kelompok memiliki rasa kebersamaan dalam kelompok hal ini didukung dari jawaban Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa anggota kelompok SPP selalu menunjukkan sikap yang positif dalam kelompok, sehingga sangat jarang ditemukan perselisihan antara anggota kelompok SPP hal senada juga diungkapkan oleh Ketua TPK yang menyatakan bahwa anggota kelompok SPP bersikap baik, antara individu dalam kelompok juga saling mendukung antara satu sama lain dan selalu menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka dalam kelompok sehingga tidak menjadi kendala dalam keberlangsungan kelompok dan tidak menghambat proses kegiatan SPP mereka.

Secara umum dapat dilihat bahwa kelembagaan SPP oleh kaum perempuan sudah kuat. Hal ini diperkuat dari jawaban Ketua kelompok peserta SPP di Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa peserta kelompok mau menerima setiap saran atau pengarahan dari tim pelaksana seperti Ketua TPK dan

Ketua kelompok mereka, sehingga kelompok SPP menjadi semakin kuat dan bersatu dalam menjalankan kegiatan SPP mereka.

Pengembangan Potensi Kegiatan SPP Pedesaan

Suatu kegiatan dilaksanakan tentu akan diharapkan ada hasil yang dilaksanakan tersebut. Hasil kegiatan akan terlihat baik atau tidak bagi kelompok sasaran setelah melihat dampak yang diterima oleh kelompok sasaran dari kebijakan yang diterapkan tersebut. Terkait dengan program Simpan Pinjam Perempuan ini kemampuan untuk mengembangkan potensi sangat dibutuhkan untuk tetap bertahan dalam usaha yang dibuat. Terkait dengan kemampuan mengembangkan usaha yang dibentuk oleh peserta kelompok Simpan Pinjam Perempuan masyarakat sudah mampu berkembang dalam usaha yang dibentuknya seiring bergulirnya dana SPP tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa sejauh program Simpan Pinjam Perempuan dilaksanakan di Desa Salam Tani peserta Simpan Pinjam perempuan sudah mampu mengembangkan usaha yang dibuatnya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu anggota kelompok SPP yang sudah memiliki usaha warung kecil sebelum program SPP ada, setelah program SPP dibentuk di Desa Salam Tani dimana ia menjadi salah satu anggota kelompok SPP sehingga secara langsung ia mendapat dana simpan dan dana pinjam dengan demikian dana ia gunakan untuk mengembangkan usaha warung yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih besar. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua TPK Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa masyarakat sudah mampu mengembangkan potensi yang ada dalam proses pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan dimana masyarakat tidak hanya berfokus pada suatu usaha saja, melainkan masyarakat selalu berupaya untuk terus mengembangkan segala usaha yang bisa dibentuk seiring adanya program Simpan Pinjam perempuan tersebut. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian masyarakat yang terdaftar sebagai anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani sudah mampu mengembangkan potensi yang ada dalam kegiatan yang dimilikinya hal ini terlihat dari usaha masyarakat untuk menggunakan dana kelompok yang tersisa dengan membentuk usaha baru yang dilaksanakan dengan berkelompok.

Pengembangan potensi diri juga sangat terpengaruhi oleh adanya kegiatan yang dibentuk dalam masyarakat. Pengembangan potensi diri maksudnya ialah seiring adanya program SPP tersebut diharapkan masyarakat menyadari kemampuan yang ada pada dirinya. Hal ini didukung dari jawaban responden yang menyatakan bahwa seiring adanya program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani ia menjadi terlatih untuk melakukan dibidang administrasi, pembukuan dan keuangan. Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa masyarakat mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dimana masyarakat yang dulunya tidak memiliki rasa percaya diri untuk menambah pendapatan rumah tangga kini masyarakat semakin berdaya seiring masuknya dana SPP. Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua TPK yang menyatakan masyarakat menjadi berdaya setelah masuknya program Simpan Pinjam Perempuan di Desa

Salam Tani pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembentukan usaha dan pengembangan usaha yang dibuat.

Kemudahan Akses Pendanaan

Pendanaan merupakan unsur pokok yang terpenting dalam proses pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan. Pendanaan maksudnya ialah merupakan faktor pendukung utama bagi berjalannya suatu Simpan Pinjam Perempuan. Karena yang terutama yang harus dipenuhi dalam program Simpan Pinjam Perempuan adalah dana sebagai pendorong dalam pelaksanaan dan keberlangsungan kegiatan. Dalam hal ini seyogyanya masyarakat sebagai peserta anggota Simpan Pinjam Perempuan memperoleh kemudahan dalam akses pendanaan. Untuk akses pendanaan sudah selayaknya semua peserta Simpan Pinjam mempunyai akses yang sama dalam memperoleh pendanaan. Terkait dengan akses pendanaan responden menyatakan bahwa seluruh anggota simpan Pinjam mempunyai hak yang sama dalam memperoleh dana Simpan dan dana Pinjam, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada salah satu atau beberapa anggota kelompok Simpan Pinjam. Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua TPK Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa seluruh peserta Simpan Pinjam Perempuan mempunyai akses yang sama dalam memperoleh pendanaan karena semua peserta tentu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kelompok dari pihak pelaksana sendiri tidak pernah membedakan antara satu individu dengan individu yang lain dalam proses kegiatan.

Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, akses dalam memperoleh pendanaan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani sudah cukup baik dimana masyarakat diberi kemudahan dan pihak penyelenggara menjalankan tugasnya berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga masyarakat tidak merasa mengalami kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi haknya sebagai anggota kelompok SPP.

Pernyataan peneliti juga diperkuat oleh Ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa dalam proses pendanaan tidak pernah terjadi keterlambatan penyaluran dana kepada anggota kelompok. Dampak yang diharapkan dari program Simpan Pinjam Perempuan ialah kemudahan masyarakat dalam memperoleh dana pinjaman. Kemudahan terkait dengan penyampaian dana kepada peserta yang tepat dengan waktu yang sudah ditentukan. Demikian pula kegiatan SPP di Desa Salam Tani ini penyaluran dana sudah dapat dikatakan baik dan tepat sasaran. Hal ini didukung dari jawaban responden yang menyatakan bahwa pada dasarnya dana yang disalurkan sudah baik dan tepat waktu, sangat jarang terjadi keterlambatan penyaluran dana kepada anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Hal ini didukung dari jawaban Kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa jarang sekali terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana, walaupun pernah terjadi antara satu atau dua kali keterlambatan penyaluran, hal itu terjadi bukan karena kelalaian tim pengelola di tingkat desa melainkan keterlambatan terjadi dari pusat.

Kemudian Ketua TPK juga menyatakan kesalahan sangat jarang terjadi dalam proses penyaluran dana kepada anggota Simpan Pinjam Perempuan, terkait dengan keterlambatan penyaluran memang pernah terjadi namun itu bukan

merupakan unsur kesengajaan melainkan hambatan terjadi dari tingkat pusat sehingga dana yang akan disalurkan kepada kelompok sasaran sedikit terlambat namun tidak mengurangi tingkat pencapaian kinerja kebijakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat penerima Simpan Pinjam Perempuan mempunyai akses yang sama dalam memperoleh dana Simpan Pinjam. Masyarakat mendapat kemudahan akses untuk memperoleh pendanaan dalam kegiatan yang dilaksanakannya.

Memperkuat Kelembagaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Memperkuat kelembagaan Simpan Pinjam Perempuan merupakan suatu dampak yang diharapkan akan terwujud setelah program SPP tersebut dilaksanakan pada suatu Desa atau kelurahan tertentu. Memperkuat disini dalam arti bahwa kelompok Simpan Pinjam Perempuan tidak hanya mampu untuk mengembangkan usaha yang dibangunnya seiring adanya SPP ini, melainkan masyarakat mampu mempertahankan kegiatan kelompok yang sudah ada, atau bahkan memperkuatnya sehingga kelompok tersebut tidak menjadi terpecah sehingga kegiatan yang harusnya dilakukan menjadi terhambat atau bahkan berhenti.

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan menggunakan strategi yang disepakati oleh Tim pelaksana SPP ditingkat pedesaan atau tingkat kelurahan. Strategi ini setidaknya mampu mempertahankan kegiatan atau kelompok yang sudah dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani ini. Usaha memperkuat kelembagaan tidak perlu langsung kepada tindakan yang terlalu menonjol dan begitu terlihat, usaha ini dapat dimulai dari kesungguhan untuk menjalankan prosedur yang sudah ada dalam kegiatan Program Simpan Pinjam Perempuan. Hal ini didukung dari jawaban responden yang menyatakan bahwa tidak ada strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan Simpan Pinjam Perempuan, hanya saja Tim pelaksana dan peserta kelompok SPP mengikuti dan menjalankan prosedur yang sudah ditentukan seiring adanya Program SPP di Desa Salam Tani. Hal senada juga dinyatakan oleh ketua TPK yang menyatakan bahwa semua pihak selalu menjalankan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga dengan demikian secara otomatis kelembagaan dalam Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani semakin hari sudah semakin kuat pula. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, terkait memperkuat kelembagaan kelompok SPP di Desa Salam Tani sudah terlihat dimana semua anggota SPP sangat serius dalam mengelola dana yang diterimanya dengan demikian kelembagaan akan semakin kuat pula.

Pernyataan peneliti juga diperkuat oleh ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa salah satu usaha yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ialah melakukan pengawasan langsung terhadap kelompok simpan pinjam yang diketuainya, pengawasan dilakukan setiap 2 minggu sekali turun kekegiatan kelompok dan melihat hambatan-hambatan apa yang dialami oleh

masyarakat, sehingga apabila ditemukan hambatan maka akan segera dilakukan tindakan yang serius untuk mengatasi hambatan tersebut.

Secara Umum dapat dilihat bahwa kelembagaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Salam Tani sudah kuat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kadang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti kesalahpahaman antara anggota dalam kelompok dan penyalahgunaan dana pinjaman. Hal ini dinyatakan oleh kepala Desa Salam Tani yang menyatakan bahwa ketidakpahaman antara anggota kelompok kadang terjadi namun hal itu tidak menjadi penghambat karena dari perselisihan yang ada dijadikan pelajaran bagi anggota kelompok sehingga kelembagaan kegiatan menjadi semakin kuat

PENUTUP

Proses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan tergolong kedalam Program yang cukup baik. Hal ini terungkap dari hasil yang didapat dari penelitian lapangan yang dilakukan kepada informan, yang menilai bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan mencakup beberapa indikator, antara Sosialisasi dan penyebaran informasi program, Proses partisipatif pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pemetaan sosial, Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka, Akuntabilitas dan laporan perkembangan.

Implementasi program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan ini memberikan manfaat bagi kaum perempuan, tetapi di lain sisi masih memiliki beberapa kekurangan. Manfaat yang dirasakan oleh para target sasaran program ini (perempuan) yaitu memenuhi kebutuhan konsumtif dalam kegiatan sehari-hari, mengembangkan usaha mikro yang telah atau belum kaum perempuan miliki sebelum menerima bantuan modal (seperti: usaha warung, usaha air isi ulang, pembuatan keripik atau opak, dll), menjadikan wanita lebih berdaya dan mandiri sehingga mampu mengelola usaha mikro yang mereka miliki.

Faktor-faktor yang terdapat dalam implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Salam Tani pada dasarnya sudah cukup baik sehingga pelaksanaan bisa berjalan secara kondusif, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan yang ada di lapangan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di agen pelaksana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sehingga kinerja menjadi kurang optimal, keterbatasan anggaran yang menimbulkan tersendatnya pelaksanaan dan tidak adanya pelatihan peningkatan *skill* sehingga pemberian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadi kurang bermanfaat.

Rekomendasi Kebijakan

Perlunya penerahan Sumber Daya yang lebih baik dalam proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan tersebut. Sumber daya yang dapat dikerahkan misalnya penyediaan akses bagi masyarakat untuk kelancaran usaha yang dibuat. Pelatihan dan bimbingan perlu lebih ditingkatkan dengan memakai para pelatih dan pembimbing yang profesional dan berkompeten mengenai program tersebut atau orang-orang yang ahli dalam program tersebut.

Perlu dibuat suatu cara atau sistem untuk memantau penggunaan dana oleh penerima SPP, agar dana pinjaman yang diterima benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan & Sulistyastuti, Dyah Ratih (2012), *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. (2012), *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Cresweel, Jhon W. (2013), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2013), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harrison, Lisa. (2007), *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- K. Yin, Robert. (2003), *Studi Kasus Desain & Metode Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Nalom 2021. *Statistika Dasar (Konseptualisasi dan Aplikasi)*, CV. Kultura Digital Media.
- Soekanto, Soerjono (2006), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugyono. (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, Mulyanto & Evers, Hans Dieter (1982), *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, Michael & Smith, Stephen C. (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi kedelapan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zainal Abidin, Said (2004), *Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Berita Resmi Statistik No. 06/0 1/Th. XVII, 2 Januari 2014
Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP